



Evaluation of Village-Owned Enterprise (BUMDes) Financial Management in Supporting Village Own-Source Revenue: A Case Study of BUMDes in Kerinci Regency

Zachari Abdallah¹⁾, Nurapni Jami Putri ²⁾ Maryanto³

Email: zachari.abdallah87@gmail.com, nurafnijamiputri@gmail.com, maryantoyanto1974@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci

ABSTRACT

This study aims to analyze the alignment of financial management principles and governance in Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Kerinci Regency, as well as to measure the contribution of BUMDes dividends to Village Original Income (PADes). Utilizing a mixed-methods approach with a sequential explanatory strategy, this study examined a sample of 30 BUMDes selected through stratified purposive sampling based on their business development stages (Advanced, Developing, and Emerging categories). The evaluation was based on five key indicators: planning and budgeting, transaction bookkeeping, reporting and accountability, operational efficiency (operating ratio), and governance score. The results reveal a significant performance gap in both financial metrics and governance across the BUMDes categories. The Advanced category (n=5) achieved the highest performance, with an average annual revenue of IDR 519,000,000, a net profit of IDR 198,747,000, and a governance score of 92.6, dominating PADes contributions at 85.8% (an average of IDR 58,000,600/year). The Developing category (n=15) recorded an average revenue of IDR 103,800,000, a net profit of IDR 23,946,000, and a governance score of 73.5, contributing 14.2% to PADes (an average of IDR 3,200,000/year). Meanwhile, the Emerging/Passive category (n=10) demonstrated the lowest performance, with an average revenue of IDR 17,100,000, a net profit of IDR 1,021,000, a governance score of 49.8, and a 0% contribution to PADes.

Keywords : Village-Owned Enterprises (BUMDes), Financial Management, Village Original Income (PADes), Good Village Governance, Operational Efficiency.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa masih menjadi salah satu solusi bagi permasalahan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, terutama yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Hal ini terbukti melalui berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk menggali potensi desa agar terus maju dan berkembang serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu kebijakan tersebut adalah memberikan keleluasaan kepada masyarakat desa untuk membentuk usaha mandiri yang didukung oleh pemerintah daerah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pelembagaan BUMDes ditujukan untuk mendukung pemberdayaan potensi-potensi desa yang pada akhirnya dapat mendukung kebijakan makro pemerintah dalam pengentasan kemiskinan (Maryunani, 2019). Pendirian BUMDes juga menjadi pilar strategis dalam meningkatkan kemandirian ekonomi desa sesuai dengan mandat PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. Keberhasilan BUMDes tidak hanya diukur dari keberlangsungan unit usaha yang dikelola, tetapi juga dari kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) serta tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangannya.

Pengelolaan keuangan BUMDes merupakan bagian penting dari tata kelola yang baik atau good governance. Good governance membentuk keseimbangan prinsip-prinsip pengendalian terhadap kewenangan dan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi sehingga dapat berkembang secara lebih baik dan sehat (Anggraini & Hastuti, 2020). Aktivitas bisnis dan keuntungan yang diperoleh BUMDes apabila disertai dengan pengelolaan keuangan yang baik akan berpengaruh terhadap pencapaian indikator pembangunan desa, terutama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan mengurangi kesenjangan. Pengelolaan keuangan BUMDes mencakup perencanaan keuangan melalui penyusunan anggaran dan rencana keuangan jangka pendek maupun jangka panjang, pengelolaan sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah, pinjaman, investasi, maupun pendapatan internal, serta pengaturan pengeluaran untuk kegiatan operasional dan investasi sesuai anggaran yang ditetapkan. Selain itu, pengelolaan keuangan juga mencakup penyusunan laporan keuangan secara periodik, pengawasan dan pengendalian penggunaan dana, evaluasi kinerja keuangan, pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan manajemen keuangan dan akuntansi, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam konteks pengelolaan BUMDes, aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi semakin penting karena terdapat hubungan antara pemerintah desa, masyarakat, dan pengelola BUMDes. Teori Keagenan menurut Jensen & Meckling tahun 1976 menekankan adanya potensi konflik antara prinsipal dan agen akibat asimetri informasi. Dalam konteks BUMDes, pemerintah desa dan masyarakat berperan sebagai prinsipal, sementara pengelola BUMDes bertindak sebagai agen. Konflik kepentingan dapat muncul ketika pengurus tidak transparan dalam pengelolaan keuangan. Studi sebelumnya menemukan bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi dapat mengurangi asimetri informasi melalui transparansi laporan dan jejak digital transaksi. Oleh karena itu, penerapan aplikasi keuangan dipandang mampu memperkuat mekanisme akuntabilitas dan mengurangi potensi moral hazard dalam pengelolaan BUMDes (Anisa et.al, 2025). Pengelolaan keuangan BUMDes mencakup seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pengawasan, dan pelaporan atas aktivitas keuangan yang dilakukan oleh badan usaha desa dengan tujuan menjamin keberlangsungan usaha serta akuntabilitas penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk kegiatan usaha.

Pengelolaan keuangan yang baik harus memenuhi prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan partisipatif (Haris dan Muhtar, 2022). Dalam konteks BUMDes, pengelolaan keuangan bukan hanya berkaitan dengan pencatatan kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pengambilan keputusan keuangan berdasarkan data dan informasi yang valid. BUMDes sebagai entitas usaha desa dituntut untuk menjalankan sistem keuangan yang profesional meskipun berada dalam lingkungan non-korporat. Oleh karena itu, peran bendahara dan pengurus keuangan menjadi sangat penting dalam memastikan setiap aktivitas usaha dapat dipertanggungjawabkan. Apabila sistem keuangan lemah, risiko penyalahgunaan dana, konflik internal, dan kegagalan usaha menjadi semakin tinggi (Yulianti & Mahmud, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan memiliki keterkaitan erat dengan keberlangsungan usaha BUMDes dan kemampuan badan usaha tersebut dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi desa.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kontribusi BUMDes terhadap pembangunan desa adalah Pendapatan Asli Desa (PADes). Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan penerimaan atau pendapatan yang diperoleh Pemerintah Desa dari sumber-sumber dalam wilayah desa yang dipungut berdasarkan Peraturan Desa serta seluruh penerimaan uang melalui rekening kas desa yang menjadi hak desa dalam satu tahun anggaran tanpa kewajiban untuk dibayar kembali. PADes diperoleh melalui pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PADes terdiri atas beberapa kelompok utama, yaitu hasil usaha desa yang meliputi bagi hasil atau dividen dari BUMDes atau BUMDes Bersama, hasil aset desa seperti

pengelolaan tanah kas desa, pasar desa, tambatan perahu, bangunan desa, atau tempat wisata desa, swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat, serta lain-lain pendapatan asli desa yang sah seperti hasil pungutan desa, pendapatan bunga atas rekening kas desa, dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.

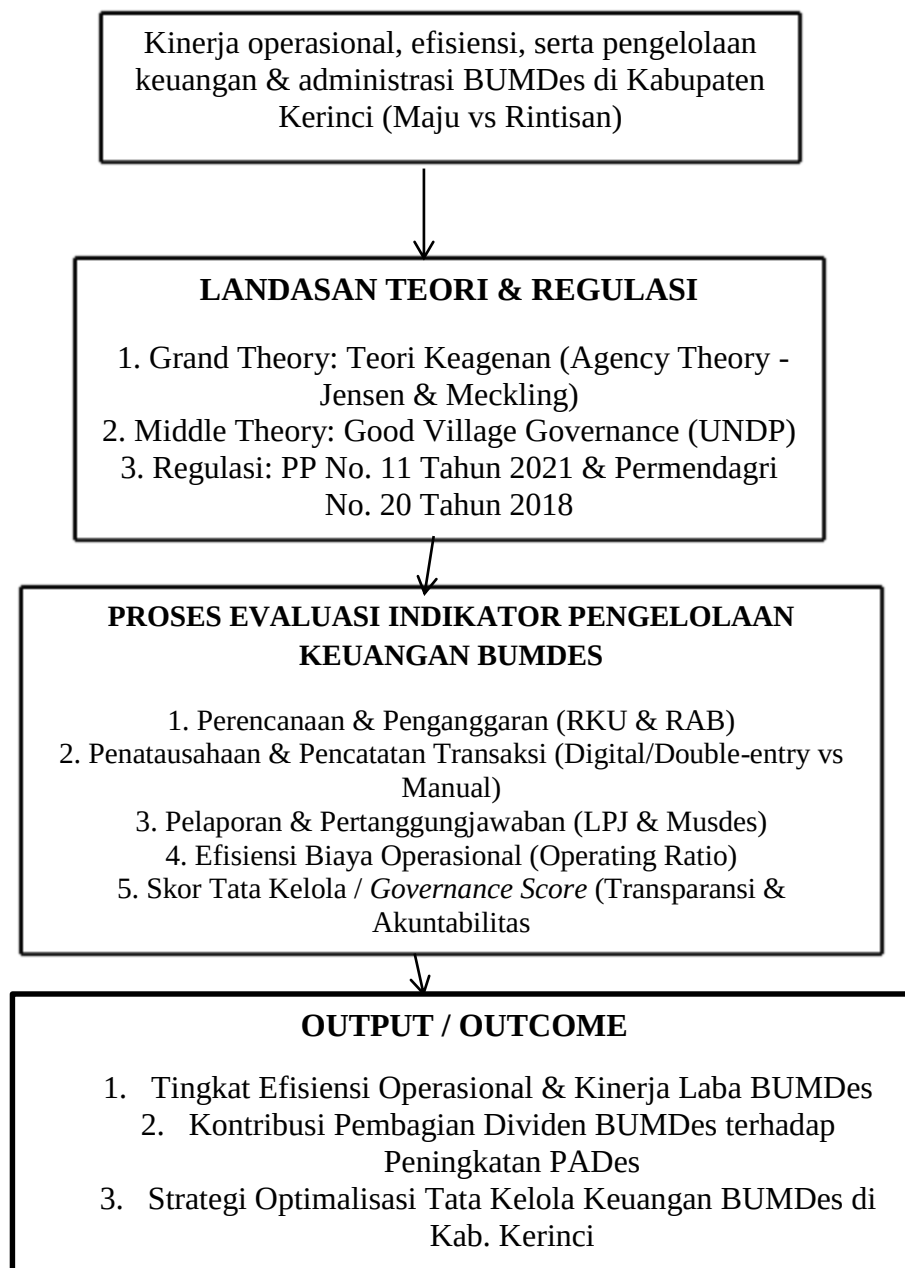
Dalam upaya mewujudkan pengelolaan BUMDes yang efektif, prinsip Good Village Governance atau tata kelola pemerintahan dan desa yang baik juga menjadi landasan penting. Good Village Governance merupakan sistem, mekanisme, dan proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa yang mengedepankan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, dan kepatuhan hukum untuk mencapai kesejahteraan serta kemandirian masyarakat desa. Dalam pengelolaan BUMDes, Good Village Governance merupakan adaptasi dari konsep Good Corporate Governance (GCG) dan Good Governance publik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan kemandirian. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai pengelolaan anggaran, potensi desa, dan laporan keuangan BUMDes atau desa kepada masyarakat melalui Musyawarah Desa (Musdes) maupun media informasi desa. Akuntabilitas berkaitan dengan kejelasan fungsi, struktur, dan pertanggungjawaban pengurus desa atau BUMDes dalam mengelola modal, aset, dan kewenangan yang diberikan. Responsibilitas menekankan kepatuhan terhadap regulasi serta pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat, sedangkan kemandirian menekankan pengelolaan pemerintahan dan unit usaha secara profesional tanpa intervensi pihak tertentu atau kepentingan politik lokal yang merugikan.

Selain tata kelola dan kontribusi terhadap PADes, efisiensi operasional juga menjadi aspek penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan BUMDes. Efisiensi operasional BUMDes merupakan kemampuan manajemen BUMDes dalam mengoptimalkan penggunaan seluruh sumber daya keuangan, aset, dan tenaga kerja yang dimiliki guna menghasilkan pendapatan (revenue) maksimal dengan tingkat beban atau biaya operasional (operating expenses) sekecil mungkin. Efisiensi tersebut menunjukkan sejauh mana sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan usaha. Dalam pengelolaan keuangan entitas usaha desa, tingkat efisiensi operasional umumnya dapat diukur menggunakan indikator Rasio Operasional (Operating Ratio), yaitu perbandingan antara total biaya operasional dengan total pendapatan operasional dalam satu periode akuntansi. Semakin efisien pengelolaan biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan, semakin baik pula kemampuan BUMDes dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, memiliki potensi ekonomi desa yang sangat variatif, mulai dari sektor agrowisata seperti BUMDes Pendung Talang Genting/Pentagen hingga sektor jasa dan perdagangan masyarakat lokal. Namun demikian, terdapat kesenjangan antara BUMDes yang telah berkembang maju dan BUMDes yang masih mengalami kendala dalam pengelolaan keuangan administratif, keterlambatan pelaporan, serta keterbatasan sumber daya manusia. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap kesesuaian prinsip pengelolaan keuangan BUMDes, terutama dalam aspek perencanaan, pengalokasian, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian prinsip pengelolaan keuangan BUMDes di Kabupaten Kerinci serta mengukur seberapa besar kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas tata kelola dan efisiensi pengelolaan keuangan BUMDes sekaligus menjadi dasar dalam mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.

Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:
Kerangka Berpikir



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi (*Mixed Methods*) dengan strategi Eksplanatori Sekuensial (*Sequential Explanatory Strategy*). Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur kinerja keuangan, rasio efisiensi, dan besarnya kontribusi dividen BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengevaluasi penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta kendala tata kelola keuangan BUMDes di Kabupaten Kerinci.

Populasi: Seluruh BUMDes terdaftar di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kerinci sebanyak 144 BUMDes yang tersebar di 285 Desa.

Sampel: Sebanyak 30 BUMDes dipilih sebagai sampel representative ($n=30$).

Teknik Sampling: Menggunakan *Stratified Purposive Sampling*, di mana sampel dikelompokkan berdasarkan tingkat kemajuan BUMDes (Maju, Berkembang, dan Rintisan/Pasif) dengan kriteria:

1. BUMDes telah beroperasi minimal 2 (dua) tahun fiskal berturut-turut.
2. Mewakili variasi sektor usaha (wisata, perdagangan, jasa keuangan, pertanian).
3. Memiliki kejelasan dokumen keuangan atau aksesibilitas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alur Siklus Laporan Keuangan Bumdes

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 30 BUMDes sampel di Kabupaten Kerinci, alur pengelolaan dan siklus pelaporan keuangan BUMDes dipetakan secara sistematis melalui 5 (lima) tahapan utama. Ketepatan dalam menjalankan alur ini menjadi penentu utama efisiensi operasional BUMDes serta besarnya kontribusi bagi Pendapatan Asli Desa (PADes).

NO	Nama BUMDes & Desa	Kategori	Sektor Usaha Utama	Omzet / Tahun (Rp)	Laba Bersih (Rp)	Bagi Hasil PADes (%)
1	Pentagen (Pendung Talang Genting)	Maju	Pariwisata & Agrowisata	812.000.000	284.200.000	32,5%
2	Tirta Mandiri (Siulak)	Maju	Pengolahan Air & Dagang	640.000.000	230.400.000	30,0%
3	Alam Asri (Kayu Aro)	Maju	Agrowisata & Penyewaan	490.000.000	171.500.000	28,0%
4	Barokah Utama (Sitinjau Laut)	Maju	Jasa Perdagangan & Perbankan Desa	380.000.000	144.400.000	25,0%
5	Maju Bersama (Danau Kerinci)	Maju	Pariwisata & Kuliner	273.000.000	114.660.000	30,0%
6	Karya Bersama (Gunung Raya)	Berkembang	Jasa Keuangan & Penyewaan	185.000.000	44.400.000	15,0%
7	Pematang Indah (Air Hangat)	Berkembang	Penyewaan Alat & Tenda	142.000.000	31.240.000	12,5%
8	Mulia Tani (Siulak Mukai)	Berkembang	Toko Saprota & Dagang	118.000.000	25.960.000	10,0%
9	Bukit Impian (Kayu Aro Barat)	Berkembang	Jasa Pertanian	95.000.000	21.850.000	10,0%
10	Subur Makmur (Kelayang)	Berkembang	Simpan Pinjam & Jasa	78.000.000	17.160.000	8,0%
11	Sejahtera Mandiri (Danau Kerinci B.)	Berkembang	Penyewaan Sarana Olahraga	110.000.000	26.400.000	12,0%
12	Harapan Kita (Tanah Cogok)	Berkembang	Jasa Perdagangan	88.000.000	18.480.000	10,0%
13	Maju Jaya (Depati VII)	Berkembang	Toko Sembako & Jasa	105.000.000	23.100.000	10,0%
14	Tunas Baru (Batang Merangin)	Berkembang	Persewaan Equipment	62.000.000	13.640.000	8,0%
15	Bumi Subur (Air Hangat Timur)	Berkembang	Jasa Keuangan Desa	130.000.000	32.500.000	14,0%
16	Usaha Bersama (Gunung Kerinci)	Berkembang	Pengolahan Hasil Tani	92.000.000	20.240.000	10,0%
17	Lestari Alam (Air Hangat Barat)	Berkembang	Penyewaan Alat Berat/Truk	155.000.000	37.200.000	15,0%
18	Sentosa (Siulak)	Berkembang	Toko Desa	70.000.000	14.700.000	8,0%

19	Harmoni Desa (Kayu Aro)	Berkembang	Jasa Kebersihan & Wisata	127.000.000	30.480.000	12,0%
20	Bintang Selatan (Sitinjau Laut)	Berkembang	Penyewaan Lapak Pasar	98.000.000	21.560.000	10,0%
21	Tunas Muda (Batang Merangin)	Pasif/Rintisan	Simpan Pinjam Sederhana	28.000.000	2.200.000	0,0%
22	Harapan Bersama (Gunung Raya)	Pasif/Rintisan	Toko Kelontong	18.000.000	900.000	0,0%
23	Tani Sejahtera (Air Hangat)	Pasif/Rintisan	Simpan Pinjam	12.000.000	350.000	0,0%
24	Mekar Sari (Kelayang)	Pasif/Rintisan	Usaha Kecil Pertanian	22.000.000	1.800.000	0,0%
25	Suka Maju (Depati VII)	Pasif/Rintisan	Toko Saproten	31.000.000	2.450.000	0,0%
26	Karya Mandiri (Air Hangat Timur)	Pasif/Rintisan	Jasa Foto & Fotocopy	15.000.000	600.000	0,0%
27	Bumi Asri (Danau Kerinci)	Pasif/Rintisan	Perdagangan Sederhana	9.000.000	(150.000)	0,0%
28	Bina Desa (Siulak Mukai)	Pasif/Rintisan	Simpan Pinjam Desa	11.000.000	200.000	0,0%
29	Sumber Rejeki (Gunung Kerinci)	Pasif/Rintisan	Jasa Tebas/Kebun	7.000.000	150.000	0,0%
30	Tirta Jaya (Air Hangat Barat)	Pasif/Rintisan	Jasa Air Sederhana	18.000.000	1.100.000	0,0%

- Perencanaan & Penganggaran (RKU & RAB) Tahap perencanaan merupakan fondasi awal dalam alur laporan keuangan. BUMDes yang akuntabel mengawali tahun fiskal dengan menyusun Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). BUMDes
 - Kategori Maju (n=5): 100%** sampel menyusun RKU dan RAB secara komprehensif sebelum tahun fiskal berjalan. Penyusunan anggaran didasarkan pada analisis *cash flow* dan target pendapatan terukur yang kemudian dilegalisasi melalui Musyawarah Desa (Musdes). BUMDes
 - Kategori Berkembang (n=15):** Menyusun RAB sederhana. Namun, 60% BUMDes dalam kelompok ini sering mengalami mis-budgeting di pertengahan tahun karena adanya pengeluaran tak terencana yang tidak diimbangi dengan adendum RAB resmi. BUMDes
 - Kategori Rintisan/Pasif (n=10): 90%** sampel tidak memiliki RKU dan RAB yang terstruktur. Pengeluaran anggaran operasional bersifat insidental tanpa tolok ukur *target-costing*, sehingga memicu ketidakpastian pengembalian modal.
- Penatausahaan & Pencatatan Transaksi (Digital/*Double-Entry* vs *Manual*) Sistem pencatatan transaksi menentukan tingkat validitas data keuangan yang dihasilkan oleh BUMDes.
 - Pencatatan Digital / *Double-Entry* (BUMDes Maju): BUMDes Maju (seperti BUMDes Pentagon dan BUMDes Tirta Mandiri) telah menerapkan pencatatan akuntansi berbasis Digital / Aplikasi Pembukuan BUMDes dengan sistem berpasangan (*double-entry*). Hal ini membuat seluruh arus kas (masuk/keluar) otomatis terkoneksi dengan Neraca dan Laporan Laba/Rugi secara *real-time*.
 - Pencatatan Manual / *Single-Entry* (BUMDes Berkembang): Menggunakan pencatatan manual berupa Buku Kas Umum (BKU), Buku Bank, dan Buku Pembantu Kas. Walaupun rapi, kelemahannya terletak pada tingginya risiko *human error* dan keterlambatan rekapitulasi di akhir bulan.

- c. Pencatatan Tak Terstruktur (BUMDes Rintisan): Pencatatan dilakukan pada buku catatan lepas (single-entry sederhana) dan sering kali mencampurkan kas operasional BUMDes dengan kas pribadi pengurus. Bukti transaksi (kuitansi/nota) fisik yang tersimpan rata-rata di bawah 40%.

3. Pelaporan & Pertanggungjawaban (LPJ & Musdes)

Alur laporan keuangan adalah penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang disahkan melalui forum tertinggi desa, yaitu Musyawarah Desa (Musdes).

Indikator LPJ & Musdes	BUMDes Maju (n=5)	BUMDes Berkembang (n=15)	BUMDes Rintisan/Pasif (n=10)
Kelengkapan Laporan (Laba/Rugi & Neraca)	100% Lengkap	66,7% Laba/Rugi Saja	10% Hanya Catatan Kas
Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ	Tepat Waktu (Akhir Tahun)	Terlambat 1–3 Bulan	Belum/Tidak Menyusun LPJ
Penyetoran Dividen ke PADes	Consistently High (25% – 32,5%)	Moderate (8% – 15%)	0% (Tidak Menyetor)

Kesuksesan BUMDes Maju menyetor dividen secara teratur ke PADes dipengaruhi oleh kepatuhan mereka terhadap penyampaian LPJ di Musdes. Sebaliknya, BUMDes Rintisan gagal menyumbang PADes akibat tidak terwujudnya LPJ yang transparan sebagai dasar perhitungan pembagian dividen.

4. Efisiensi Biaya Operasional (Operating Ratio / BOPO)

Efisiensi biaya diukur menggunakan indikator rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional)

Tabel Rata-rata efisiensi biaya operasional

Kategori BUMDes	Rata-rata Omzet	Rata-rata Laba Bersih	Rata-rata Rasio BOPO (%)
Maju	Rp 519.000.000	Rp 198.747.000	61,7% (Sangat Efisien)
Berkembang	Rp 103.800.000	Rp 23.946.000	76,9% (Cukup Efisien)
Rintisan	Rp 17.100.000	Rp 1.021.000	94,0%(Sangat Inefisien)

Tabel Perbandingan Kinerja

Indikator Evaluasi	BUMDes Maju	BUMDes Berkembang	BUMDes Rintisan
Tingkat Efisiensi (BOPO)	Sangat Efisien (61,7%)	Cukup Efisien (76,9%)	Sangat Inefisien (94,0%)
Margin Laba Bersih	38.30%	23.10%	6.00%
Kemampuan Menghasilkan Laba	Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Rendah
Risiko Keuangan	Rendah	Sedang	Sangat Tinggi

5. Skor Tata Kelola / Governance Score (Transparansi & Akuntabilitas)

Penilaian *Governance Score* menggunakan komposit skala 1–100 yang mengukur transparansi, akuntabilitas, pengawasan internal BPD, dan keterbukaan publik.

Kategori BUMDes	Rata-rata Governance Score	Predikat Tata Kelola	Kontribusi Rerata PADes
Maju	92,2	Sangat Baik/ Mandiri	Rp. 58.000.000/ Tahun
Berkembang	74,1	Cukup/ Transisi	Rp. 3.200.000/ Tahun
Rintisan	49,8	Kurang/ Buruk	Rp. 0 (Tidak Ada)

BUMDes dengan *Governance Score* tinggi (>85) terbukti mampu meminimalkan jurang informasi antara Pengurus BUMDes (*Agent*) dengan Pemerintah Desa dan Masyarakat (*Principal*). Transparansi laporan keuangan digital menutup celah manipulasi kas.

Mitigasi Moral Hazard: Pada BUMDes Kategori Rintisan (*Governance Score* 49,8), lemahnya pengawasan BPD dan tidak dilakukannya audit LPJ dimanfaatkan oleh oknum pengurus untuk tindakan moral hazard, seperti penundaan laporan kas dan penggunaan dana usaha tanpa pertanggungjawaban yang sah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan laporan keuangan BUMDes di Kabupaten Kerinci, terdapat disparitas yang signifikan dalam penerapan siklus akuntansi antar-kategori BUMDes. BUMDes Kategori Maju telah menerapkan pengelolaan keuangan yang terstruktur, mulai dari perencanaan melalui RKU/RAB, penatausahaan digital berbasis double-entry, pelaporan rutin berupa Laba/Rugi dan Neraca, hingga pembagian dividen melalui Musyawarah Desa (Musdes), sedangkan BUMDes Kategori Rintisan/Pasif masih menghadapi kendala berupa pencatatan manual, tidak tersedianya RAB, dan belum mampu menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang valid. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap efisiensi biaya operasional, di mana BUMDes Kategori Maju memiliki rata-rata rasio BOPO sebesar 61,7% yang menunjukkan tingkat efisiensi tinggi, sementara BUMDes Kategori Rintisan mencapai 94,0% yang menunjukkan inefisiensi. Dari aspek tata kelola, BUMDes Maju memperoleh *Governance Score* rata-rata 92,2 dengan predikat sangat baik, BUMDes Berkembang sebesar 74,1 dengan predikat cukup, dan BUMDes Rintisan sebesar 49,8 dengan predikat kurang, yang menunjukkan bahwa tata kelola yang baik berperan dalam menekan konflik keagenan, asimetri informasi, dan risiko moral hazard. Selanjutnya, kontribusi dividen dari 30 BUMDes sampel terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) mencapai Rp338.008.600 per tahun fiskal, dengan 85,8% di antaranya berasal dari BUMDes Kategori Maju. Dengan demikian, BUMDes yang memiliki sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan terstruktur, efisiensi operasional yang baik, serta tata kelola yang kuat terbukti memberikan kontribusi lebih besar terhadap peningkatan PADes dan kemandirian finansial desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, Z., & Maryanto, M. (2022). Penerapan Akuntansi Dan Kesesuaiannya Dengan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM): Studi Kasus Pada Umkm Kabupaten Kerinci. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 2(2), 303-316.
- Anggraini, D., & Hastuti, S. (2020). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(2), 45-56.
- Anisa, R., Fitriani, N., & Rahmawati, E. (2025). Peran Sistem Informasi Akuntansi dalam Memitigasi Moral Hazard dan Asimetri Informasi pada Pengelolaan BUMDes. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 13(1), 88-101.).
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications. (Referensi Utama Metode Mixed Methods).
- Baviga, R., Abdallah, Z., & Sandi, V. A. (2025). Penggunaan Sistem Digital Keuangan dalam Meningkatkan Laporan Keuangan BUMDes, UMKM dan Home Industry Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA*, 4(1), 1726-1737..

- Haris, A., & Muhtar, M. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigms*, 13(2), 210–225.
- Jurnal RIGGS. (2025). Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Dalam Meningkatkan Efisiensi Operasional BUMDes di Kabupaten Kerinci. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*.
- Maryunani. (2019). *Pengembangan BUMDes dan Pemberdayaan Ekonomi Desa*. Bandung: Alfabeta.).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (mengatur kelembagaan, status hukum, dan tata kelola BUMDes)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611*. Jakarta.
- Pratama, A., & Hidayat, R. (2021). Analisis Efisiensi Biaya Operasional (BOPO) terhadap Kinerja Keuangan BUMDes Sektor Jasa dan Perdagangan. *Jurnal Manajemen Keuangan Desa*, 6(2), 77–89.
- Rahayu, S., & Putra, I. G. (2023). Kontribusi Dividen BUMDes Terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Dalam Mewujudkan Kemandirian Finansial Desa. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 10(1), 34–48
- Wibowo, M. I. S., & Hapsari, A. N. S. (2022). Pengelolaan Keuangan BUMDes: Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa. *JRAP: Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 9(1), 57–71.
- Wildhani, A. M. (2021). Strategi Pembangunan dan Pengelolaan BUMDes Pendung Talang Genting (Pentagen) di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Wildhani, A. M., & Rahmawati, E. (2023). Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDes dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Ilmiah Tata Kelola & Akuntansi Desa*, 5(2), 112–126.
- Yulianti, L., & Mahmud, A. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kegagalan Pengelolaan Keuangan BUMDes Rintisan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Desa*, 5(2), 101–114.
- Yunas, N. S. (2019). Efektivitas Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Tata Kelola BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 12–25.